

**PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL
BERDASARKAN PASAL 34 UUD TAHUN 1945**

(Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI RESKY FIRADIKA

NIM: 10300113001

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Resky Firadika
Nim : 10300113001
Tempat, Tgl. Lahir : Pattallassang, 9 Juni 1995
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jln. Matahari Lr. I/12G Kel. Batang Kaluku Kec. Somba
Opu, Kab. Gowa
Judul : Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial
Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus
Dinas Sosial Kabupaten Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 1 Agustus 2017

Penyusun



Andi Resky Firadika

NIM. 10300113001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”, yang disusun oleh Andi Resky Firadika, NIM: 10300113001, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 10 Dzul-Qa’idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

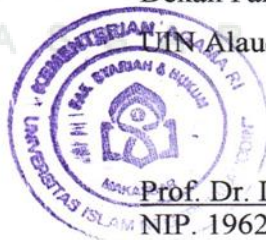
Samata, 29 Agustus 2017 M.
7 Dzul-Hijjah 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Alimuddin, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Rahmiati, S.Pd, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah swt, Tuhan pencipta alam semesta, yang telah memberikan kesempatan dan kebaikan yang tiada tara pada makhluk-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”. Sesungguhnya Allah senang tiasa mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Demikianlah petunjuk pengetahuan dari Allah swt. yang maha kuasa dan maha mengetahui serta yang maha bijaksana. Salam dan taslim tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, sebagai nabi penutup, nabi terakhir yang telah memberikan cahaya yang terang bagi umat manusia yang menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia.

Upaya semaksimal untuk menyelesaikan skripsi ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini beberapa pihak telah memberikan sumbangsi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum, dan para wakil dekan yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Nila Sasrawati, M.Si, dan Dr. Kurniati, M.H.I., masing-masing selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, telah

membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Alimuddin, M.Ag., dan Rahmiati, S.Pd, M.Pd., masing-masing selaku pembimbing penyusun yang telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., dan Dr. Kurniati, M.H.I., masing-masing selaku penguji penyusun yang telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan ibu bagian staf akademik fakultas syaria'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian mata kuliah dan penyusunan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu penulis dalam menjalani studi;
7. Para pegawai Dinas Sosial atas bantuannya dalam pengumpulan bahan-bahan penelitian skripsi ini,
8. Kedua orang tua yaitu ibunda tercinta Andi Besse Sarfiah dan ayahanda Paharuddin Kaneng, SH., MH. Yang selama ini telah memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tidak pernah putus dan hampir tidak mungkin bisa dibalaskan oleh apapun. Saya anakmu hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah swt. melihat, membalas dan memberikan sepatutnya apa yang dia ingin berikan.

9. Sanak keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis tidak bisa memberikan apa-apa tetapi penulis hanya bisa memohon kepada Allah swt. agar memberikan kemurahannya untuk mereka.
10. Masyarakat, para wali anak terlantar dan anak terlantar atas kesediaannya untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
11. Yogi Prayugo, SH., atas bimbingan, dukungan dan semangatnya selama ini, yang sangat membantu mulai dari awal pembuatan skripsi hingga akhir beserta saran-sarannya untuk kesempurnaan skripsi ini,
12. Muh. Yusran fajar SH., MH., Muh. Irsan SH., Andi.Jaya Kasma SH., Andi Firmansyah SH., Nur Khaliq Majid SH., dan yang lainnya atas dukungan dan semangatnya kepada penulis,
13. Sahabat yang layaknya seperti saudara Masnayanti, Fitriani A., Susi Sugiarti, Syamsir Alam, Mirnawati, Marwah R., St. Hudzaifah Miftahul Jannah, Evi Alviati, Rosmini, Satriani, Muh. Risman, Muh. Irham dan Wisnu Agung Pancoro yang selalu ada untuk mendukung, membantu dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini,
14. Teman seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis,
15. Saudara/i seperjuangan Posko 5 (lima) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Angkatan ke 55 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Yulianti, Nur Afni, St. Rahma, Juliastuti, Devy Purnama, Aidir Afwan, Supriadi, Muh. Fajrih Teguh dan

Raden Pandi Admaja yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat kepada penulis;

Gowa, 1 Agustus 2017

Penyusun



Andi Resky Firadika

NIM. 10300113001



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka/Peneliti Terdahulu	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	12-30
A. Tinjauan Umum Anak Terlantar.....	12
1. Pengertian Anak.....	12
2. Pengertian Anak Terlantar	14
3. Ciri-ciri Anak Terlantar	15
B. Konsep Perlindungan Anak	18
C. Konsep Kesejahteraan Sosial Anak	22
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial	22
2. Pengertian Kesejahteraan Sosial Anak	23
D. Pemeliharaan Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam	27
E. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31-35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian	34

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	34
G. Pengujian Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36-69
A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa	36
B. Penyebab Munculnya Anak Terlantar	42
C. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam Menangani Anak Terlantar.....	44
D. Hasil Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa.....	62
BAB V PENUTUP.....	70-71
A. Kesimpulan	70
B. Implikasi Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72-76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77-107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathāh</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... اَ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu“ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيْ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِّيرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaiḥ* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينَ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Andi Resky Firadika
Nim : 10300113001
Judul : Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34
UUU Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945. Yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) apa penyebab munculnya anak terlantar?, 2) apa upaya Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar?, dan 3) bagaimana hasil penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa?.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yuridis normatif (*hukum positif*) dan yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Sosial Kabupaten Gowa, masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Gowa, anak terlantar atau wali anak terlantar yang ada di sekitar Kabupaten Gowa, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, kertas dan pulpen. Selanjutnya, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis. Berdasarkan pasal 34 UUD 1945 Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah melakukan beberapa upaya untuk menangani anak terlantar seperti melakukan pendataan, memberikan pelayanan anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA, dan melakukan pendampingan anak terlantar. Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan belum efektif. Bahwa pada tahun 2016 sebanyak 2.066 anak masih terlantar dikarenakan beberapa panti asuhan tutup, kurangnya anggaran dana, kurangnya pekerja sosial dan kurangnya pendekatan awal pada saat pendataan.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk Pemerintah, perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus terhadap kepentingan anak terlantar. 2) Untuk Kementerian Sosial, perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerja sosial di tiap Kabupaten/Kota. 3) Untuk Dinas Sosial, perlu meningkatkan program-program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya. 4) Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi. 5) Untuk masyarakat, diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi anak-anak terlantar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki hasrat dan martabat yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata disemua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian pada beberapa tahun terakhir ini dan yang paling meningkat yaitu pusat perhatian terhadap kesejahteraan anak. Perhatian terhadap kesejahteraan anak merupakan hal utama karena keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Dimana anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa.¹ Di sisi lain, anak adalah generasi penerus umat.²

Seorang anak merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak bisa ditinggalkan ataupun diterlantarkan sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisā'/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

¹Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015) h. 15.

²Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Cet. I; Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015), h. iii.

Terjemahannya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(4:9)”³

Selain ayat tersebut, pemerintah sebagai pemimpin juga bertanggungjawab menjamin kehidupan anak sebagaimana Arif Gosita mengatakan anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah).⁴ Perlindungan anak ini juga sangat dibutuhkan oleh anak terlantar dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan dilihat dari sisi kesejahteraan sosialnya. Pola kehidupannya cenderung kumuh dan mengelompok di kantong-kantong kemiskinan dan tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti kolong jembatan, pinggir kali, lokasi pembuangan sampah, atau bahkan ada yang tidur di gerobak sampah bersama anak dan istrinya.⁵

Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Dan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat (1) bahwa “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan

³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 78.

⁴Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 2.

⁵Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Panduan Praktis Pendampingan dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, h. 1.

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.⁶

Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.⁸

Sebagaimana diamanatkan konstitusi, mereka adalah warga negara yang patut dan wajib mendapat perlindungan dari negara. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis tanggung jawab ini dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 bahwa “Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, bab IV, pasal 23 ayat (1).

⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h. 18.

⁸Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, pasal 3.

tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹

Dinas Sosial sebagai instansi yang berperan dalam bidang pembantuan masalah sosial telah memiliki program pelayanan sosial terutama untuk anak terlantar. Program pelayanan sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial memiliki dua bentuk pelayanan, yakni:

a. Pelayanan Kelembagaan

- 1) Pelayanan ini dilakukan oleh berbagai kelembagaan berdasarkan visi dan misi mereka. Kelembagaan yang dimaksud adalah Organisasi Sosial/LSM/yayasan, perusahaan-perusahaan (sebagai wujud tanggung jawab sosial dunia usaha), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya.
- 2) Jenis pelayanan yang berbasis kelembagaan ini dapat berupa sumber pendanaan bagi anak-anak terlantar, atau pelaksana pelayanan itu sendiri.
- 3) Berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelayanan untuk anak-anak terlantar dapat mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga untuk memperluas jangkauan pelayanan.

b. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan sosial anak terlantar ini dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang telah tumbuh di masyarakat. Pelayanan sosial ini juga

⁹Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa*, pasal 9.

dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Pelayanan sosial anak terlantar yang dilakukan oleh kelompok masyarakat antara lain:

1) Kelompok Swadaya Masyarakat

Di lingkungan masyarakat terdapat berbagai kelompok swadaya masyarakat, kelompok kekerabatan, kelompok keagamaan, arisan, PKK, persatuan warga kompleks perumahan, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini potensial untuk mendorong anak terlantar di lingkungannya. Biasanya mereka mempunyai aktivitas sosial, misalnya bantuan beasiswa, makanan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan sebagainya.

2) Pengembangan Komunitas Lokal

Pengembangan komunitas lokal merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dilihat dari:

- a) Sasaran pelayanan meliputi anak, orang tua, keluarga, warga komunitas, dan pihak-pihak yang berpengaruh lainnya.
- b) Jenis pelayanannya meliputi pendidikan dan santunan untuk anak, serta pembangunan menyeluruh bagi komunitas, baik ekonomi maupun pengembangan sosial budaya yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak.
- c) Pengembangan komunitas dalam mengatasi penyebab permasalahan anak terlantar, mengembangkan potensi yang dimiliki komunitas,

mendayagunakan sumber-sumber yang tersedia, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.¹⁰

Selain program pelayanan sosial anak terlantar, Dinas Sosial juga telah menyusun rencana kerja dan pendataan dalam menangani anak terlantar. Hal ini sebagaimana data yang diperoleh Dinas Sosial tentang anak jalanan dan anak terlantar pada seluruh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Kabupaten Gowa pada tahun 2015 tercatat sebesar 3.284 anak. Data tersebut berasal dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa diantaranya yaitu Kecamatan Somba Opu tercatat 1688 anak, Kecamatan Pallangga 1140 anak, Kecamatan Tompo Bulu 170 anak, Kecamatan Bontomarannu 92 anak, Kecamatan Bajeng 69 anak, Kecamatan Bontonompo Selatan 55 anak, Kecamatan Pattalassang 30 anak, Kecamatan Bontonompo 25 anak, dan Kecamatan Biring Bulu 15 anak.¹¹ Melihat data tersebut, hasil PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) terbanyak berada di Kecamatan Somba Opu. Meskipun Dinas Sosial telah menjalankan tugasnya dengan melakukan pendataan ataupun memasukkan anak-anak terlantar ke LKSA, tetap saja masih dijumpai anak terlantar disekitar kita yang hidup dijalanan, terlunta-lunta dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dari uraian latar belakang tersebut, fenomena ini menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”.

¹⁰Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti* (Makassar: Pemprov Sulsel, 2013), h. 14-16.

¹¹Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Data Profil LKSA Provinsi Sulawesi Selatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2015* (29 Oktober 2016).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada wilayah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan Orang Tua/Wali Anak Terlantar dan Anak Terlantar di sekitar Kabupaten Gowa.

Adapun deskripsi fokus merujuk pada penanganan anak terlantar yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan Dinas Sosial sebagai pengemban tanggung jawab pemerintah. Penanganan anak terlantar wajib dilakukan agar setiap anak terlantar dapat terpelihara dan terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 UUD RI Tahun 1945.

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman terhadap fokus penelitian dan deskripsi fokus terkait permasalahan penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa tersebut. Maka peneliti membuatnya dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses atau cara dalam menangani suatu permasalahan. • Penanganan yang dimaksud ialah proses pemecahan permasalahan mengenai anak terlantar yang masih terdapat disekitar daerah Kabupaten Gowa.
2.	Anak Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara

		<p>rohani, jasmani maupun sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciri-cirinya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak berusia 5-18 tahun, 2. Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, 3. Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, 4. Salah seorang atau kedua-duanya meninggal, 5. Keluarga tidak harmonis, 6. Tidak ada pengasuh/pengampu sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
3.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi di bawah naungan Kementerian Sosial untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang sosial. • Perannya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggulangi kemiskinan 2. Meningkatkan kesempatan kerja dan mobilitas tenaga kerja 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial 4. Pembangunan kehidupan beragama 5. Peningkatan ketrasmigrasian

		<p>Untuk anak terlantar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan Anak Terlantar, 2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar.
--	--	--

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka yang menjadi pokok masalah terkait dengan judul skripsi yaitu “Bagaimana efektivitas penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan pasal 34 UUD Tahun 1945 di Dinas Sosial Kabupaten Gowa”.

Adapun sub permasalahannya yaitu:

1. Apa penyebab munculnya anak terlantar?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar?
3. Bagaimana hasil penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa?

D. Kajian Pustaka/Peneliti Terdahulu

Skripsi ini berjudul “Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945”. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku, penelusuran internet, dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang anak terlantar. Adapun penelusuran-penelusuran tersebut, yaitu:

Pertama, buku karya Dr. Bagong Suyanto yang berjudul “*Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*” (Surabaya). Buku ini memfokuskan pembahasannya terhadap masalah sosial anak yang didalamnya membahas tentang anak terlantar salah satu

bagian dari anak rawan di mana anak yang karena tekanan kondisi atau kultural tidak terpenuhi atau dilanggar hak-haknya. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kehidupan anak terlantar yang menjadi korban keteledoran, ketidakmampuan dan sikap acuh tak acuh orang tua dan masyarakat terhadap kelangsungan hidup anak terlantar. Namun, buku ini belum menjelaskan secara spesifik upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan anak terlantar.

Kedua, buku karya Prof. Mohammad Taufik Makarao, dkk yang berjudul *“Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* (Jakarta). Buku ini memfokuskan pembahasannya terhadap anak yang merupakan potensi serta pelanjut keinginan bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Buku ini juga menjelaskan masalah anak yang mengalami rintangan kesejahteraan secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi karena pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri. Tetapi buku ini hanya menjelaskan rintangan kesejahteraan anak secara umum belum menjelaskan secara spesifik tentang anak terlantar dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar.

Ketiga, modul karya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, yang berjudul *“Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti”* (Makassar). Modul ini menjelaskan mengenai tahapan pelayanan sosial anak terlantar yang dilakukan di luar panti asuhan. Namun karena modul ini lebih spesifik ke pembahasan pelayanan sosial anak terlantar luar panti maka pembahasan tentang pelayanan sosial anak terlantar dalam panti dan bentuk pelayanannya masih terbatas dan masih kurang.

Keempat, skripsi karangan Pipit Febrianti, 2013. Yang berjudul “*Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (Psaa) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan*”. Skripsi ini menjelaskan tentang tahapan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar di PSAA dan bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak terlantar di PSAA. Skripsi ini berfokus terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PSAA. Namun belum menjelaskan bentuk pelayanan dari instansi terkait dalam permasalahan anak terlantar seperti Dinas Sosial.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab munculnya anak terlantar.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar.
3. Untuk mengetahui hasil penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya.

2. Manfaat Praktisi

Kepada lembaga hukum yang bertanggung jawab di harapkan dapat menjalankan fungsinya secara efisien sehingga masalah anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat ditangani dengan baik.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Anak

1. Pengertian Anak

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.¹² Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Kahfi/18: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahannya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(18:46)¹⁴

¹²Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. v.

¹³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 1.

¹⁴Kementrian Agama RI., *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*, h. 299.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹⁵ Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.¹⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹⁷

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.¹⁸

¹⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama), h. xv.

¹⁶MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), h. vii.

¹⁷Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 1.

¹⁸“Anak”, *Wikipedia*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. (24 Oktober 2016).

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.¹⁹ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁰

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan untuk perkembangan masa depannya.

2. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.²¹

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Menurut UU No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

¹⁹D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) h. 5.

²⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Tahun 2005.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam *Buku Pedoman Pembinaan Anak Terlantar* yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2001) disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.²²

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.²³

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

²²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 212.

²³Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 226-227.

3. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah: **Pertama**, mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu. **Kedua**, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya. **Ketiga**, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. **Keempat**, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. **Kelima**, anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.²⁴ Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁵

- a. Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
 - 1) Orang tua/keluarga tidak diketahui
 - 2) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
 - 3) Tidak memiliki tempat tinggal

²⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, h. 230.

²⁵Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, h. 19-20.

b. Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:

- 1) Hubungan dengan orang tua masih ada
- 2) Tinggal bersama orang tua/keluarganya
- 3) Rawan sosial dan putus sekolah
- 4) Tinggal dengan keluarga miskin

Menurut keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

- 1) Anak berusia 5-18 tahun,
- 2) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu,
- 3) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit,
- 4) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal,
- 5) Keluarga tidak harmonis,
- 6) Tidak ada pengasuh/pengampu,
- 7) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.²⁶

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

- 1) Anak terlantar berusia 5-18 tahun,
- 2) Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang, perlakuan yang baik dan tidak disekolahkan oleh orang tuanya,
- 3) Tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua asuh/keluarga asuh,

²⁶Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I h. 10.

- 4) Berasal dari keluarga miskin atau *broken home*,
- 5) Tidak terpenuhi hak-hak anak,
- 6) Anak yang bekerja/mencari nafkah atau anak yang menghabiskan waktunya bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.

B. Konsep Perlindungan Anak

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya.²⁷ Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁸

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,

²⁷Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya* (Cet. I; Jakarta Timur: Istanbul, 2016), h. 183.

²⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 33.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²⁹

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu negara yaitu bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.³⁰

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bahagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum sivil. (2) perlindungan anak yang bukan bersifat

²⁹Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 62.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.³¹

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

“a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan menguasai pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasiya. b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”³²

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-

³¹Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 21.

³²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 34.

mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.³³

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:³⁴

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

³³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 35.

³⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, h. 4-6.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini berasaskan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.³⁵

C. Konsep Kesejahteraan Sosial Anak

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.³⁶ Kesejahteraan Sosial menurut Sumarnonugroho adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu fungsi terorganisasi adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi.³⁷

Menurut UU RI No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

³⁵Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 141.

³⁶Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Jakarta: FISIP UI Press, 2005), h. 16.

³⁷Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 9.

Pengertian kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna, yaitu³⁸:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materil dan non materil. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi.
- 2) Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.
- 3) Sebagai tunjangan sosial, diberikan kepada orang yang tidak mampu, karena sebagian besar penerima manfaat adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur. Keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, dan ketergantungan.
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana. Yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

2. Pengertian Kesejahteraan Sosial Anak

Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁹

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 pasal 1 angka (1) bagian (a) yang dimaksud Kesejahteraan Anak adalah “Suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat

³⁸Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 104.

³⁹Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 28.

menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁴⁰

Dalam konsep kesejahteraan sosial anak, dibutuhkan program dan pelayanan yang baik. Dimana Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.⁴¹ Selain itu, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga.

Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Salah satu tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu distribusi dan tepat manfaat.⁴²

Pelayanan kesejahteraan anak adalah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi, sistematis, dan profesionalis terhadap anak terlantar yang memungkinkan terpenuhinya hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 angka 1 bagian (a).

⁴¹Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 29.

⁴²Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 37.

kembang, perlindungan, dan partisipasi.⁴³ Pelayanan kesejahteraan anak dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial menggunakan salah satu dari teori pekerja sosial, yaitu teori sistem.

Teori sistem adalah salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan permasalahan dan membuat rencana kegiatan atau treatment. Dengan cara ini pekerja sosial dapat berupaya untuk memahami kepentingan relatif dari beragam kepentingan dalam kehidupan klien. Sebagai suatu cara untuk pengembangan permasalahan yang ada, pekerja sosial dapat mengkonseptualisasi masalah-masalah dengan peristilahan system klien, agen perubahan, kegiatan, dan sistem sasaran, dalam rangka menentukan tujuan melalui upaya perubahan terencana.⁴⁴

Teori sistem merupakan teori yang menganggap bahwa pekerja sosial merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan sosial kepada individu dan masyarakat. Pekerja sosial berupaya untuk memenuhi kebutuhan individual serta meningkatkan pelayanan-pelayanan sosial tempatnya berada, sehingga dengan demikian pekerja sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial dapat bekerja dengan lebih efektif.

Teori sistem merupakan teori yang membedakan antara praktik pekerja sosial dengan profesi penolong lainnya. Hal ini karena pekerja sosial sangat memberikan perhatian dan memperhatikan pengaruh lingkungan sekitar klien ketika melakukan intervensi dan penyelesaian masalah.⁴⁵ Teori ini berupaya untuk mengubah

⁴³Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*, h. 9.

⁴⁴Pipit Febrianti, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan, Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 51.

⁴⁵Siti Napsiyah dan Lisna Diawati Fuaid, *Belajar Teori Pekerjaan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 65.

masyarakat agar bersifat lebih adil atau menciptakan pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial personal melalui pertumbuhan individu maupun masyarakat dianggap sebagai gagasan utama dalam pandangan ini.

Secara teoritis Pincus dan Minahan menyatakan terdapat empat sistem dasar dalam praktek pekerjaan sosial, yaitu⁴⁶:

1. Sistem pelaksana perubahan, pekerja sosial yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terencana.
2. Sistem klien, adalah sekelompok orang yang sepakat meminta pelayanan kepada pekerja sosial dan telah memberikan kewenangan menjadi penerima pelayanan berdasarkan kesepakatan atau kontrak dengan pekerja sosial.
3. Sistem sasaran, yaitu sekelompok orang, badan-badan, dan atau organisasi yang dijadikansasaran perubahan atau dijadikan media yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan pertolongan dan para penerima pelayanan utama memperoleh manfaat yang diharapkan.
4. Sistem aksi atau kegiatan, istilah ini dipakai untuk menggambarkan dengan siapa saja pekerja sosial bekerja dalam upayanya memenuhi tugasnya dan mencapai tujuan perubahan yang diharapkan.

Teori sistem juga membantu untuk menciptakan fokus yang menghadirkan komunikasi di antara penghuni dalam lembaga atau panti, baik sebagai cara untuk menjelaskan permasalahan dalam situasi tersebut atau sebagai cara untuk mengintervensi.⁴⁷

⁴⁶Siti Napsiyah Dan Lisna Diawati Fuaid, *Belajar Teori Pekerjaan Sosial*, h. 66.

⁴⁷Siti Napsiyah dan Lisna Diawati Fuaid, *Belajar Teori Pekerjaan Sosial*, h. 71.

D. Pemeliharaan Anak Terlantar Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.⁴⁸ Sebagaimana hubungan pemerintah dan orang tua terhadap anak-anak.

Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakikat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah swt. kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar. Oleh karena itu, seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan rasa penjagaan, cinta kasih, dan keikhlasan.⁴⁹

Dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak disebut dengan *hadhana*. *Hadhana* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Menurut ulama fiqh mendefenisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik, jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵⁰ Dalam arti yang lebih luas *hadhanah* adalah

⁴⁸Juhaya S. Praja, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 62.

⁴⁹Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, h. 99.

⁵⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, h. 114.

pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya hubungan perkawinan.⁵¹ Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadist nabi yaitu:

انّ امرأة قالت: يا رسول الله, إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء, وإنّ اباه طلقني وأراد ان ينزعه مني, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تتكحى

Artinya:

“Bahwa seorang wanita berkata, ‘Wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku?’ Rasulullah bersabda kepadanya, ‘Kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah’.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al Hakim).⁵²

Diminta atau tidak diminta, pemeliharaan (perlindungan) terhadap anak adalah hak anak. Maulana Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:⁵³

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya.
3. Hak anak dalam penerimaan nama baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

⁵¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (2009), h. 327.

⁵²Al-Hafizh Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam* (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 625.

⁵³Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grassindo, 2000), h. 32.

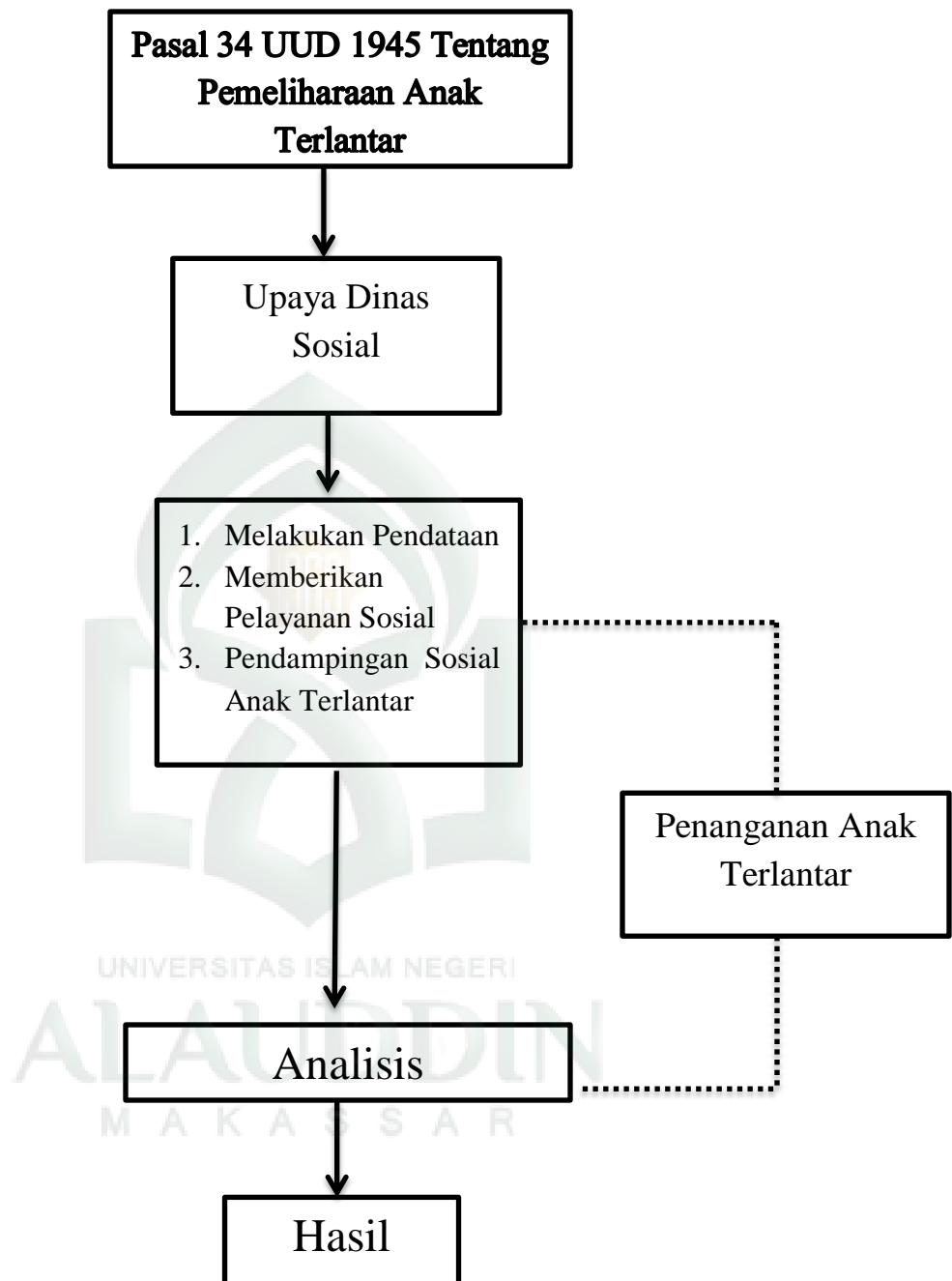
6. Hak anak dalam memiliki harta benda, (hak waris), demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin.⁵⁴

Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa termasuk anak terlantar, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.



⁵⁴Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Cipta Karya, 2000), h. 16.

E. Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (*sociologys legal research*) yaitu secara yuridis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap anak terlantar. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa. Khususnya pada wilayah kerja Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan masalah penanganan anak terlantar.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan normative (*hukum positif*) yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data skunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data kepustakaan tentang problematika dalam penanganan anak terlantar. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁵⁵

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

Pendekatan terhadap hukum normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit.

2. Pendekatan yuridis yaitu secara yuridis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap anak terlantar. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan anak terlantar atau wali anak terlantar disekitar Kabupaten Gowa. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpung data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:
 - a. Kutipan langsung
Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikitpun.

b. Kutipan tidak langsung

Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan kalimat peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.⁵⁶

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Penelitian Lapangan

a. Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dan anak yang merasakan maupun menjadi korban keterlantaran serta para pegawai pada kantor tersebut.

b. Observasi

Yaitu melakukan pencatatan data-data anak terlantar dan upaya penanganan yang dilakukan terhadap anak tersebut.

2. Studi Dokumentasi

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁵⁷ Serta menelaah buku-buku dan hasil penelitian.

⁵⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 188.

⁵⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Granit: Jakarta, 2010), h.57.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, pulpen dan kertas. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data itu.⁵⁸ Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi peneliti dalam hal ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.



⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2006), h. 330.

BAB IV
PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL
BERDASARKAN PASAL 34 UUD 1945

A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

1. Identitas Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa

- Nama Kantor : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Gowa
- Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Lantai II
- Kelurahan : Sungguminasa
- Kecamatan : Somba Opu
- Kabupaten : Gowa
- Provinsi : Sulawesi Selatan
- No. Telphon/Fax : 0411-882272 / 0411-864024
- Jumlah Pegawai : 81 Orang Pegawai
- Visi : Tercapainya Kesejahteraan Sosial Oleh dan Untuk Semua Elemen Masyarakat.
- Misi :
1. Meningkatkan manajemen pelayanan sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.

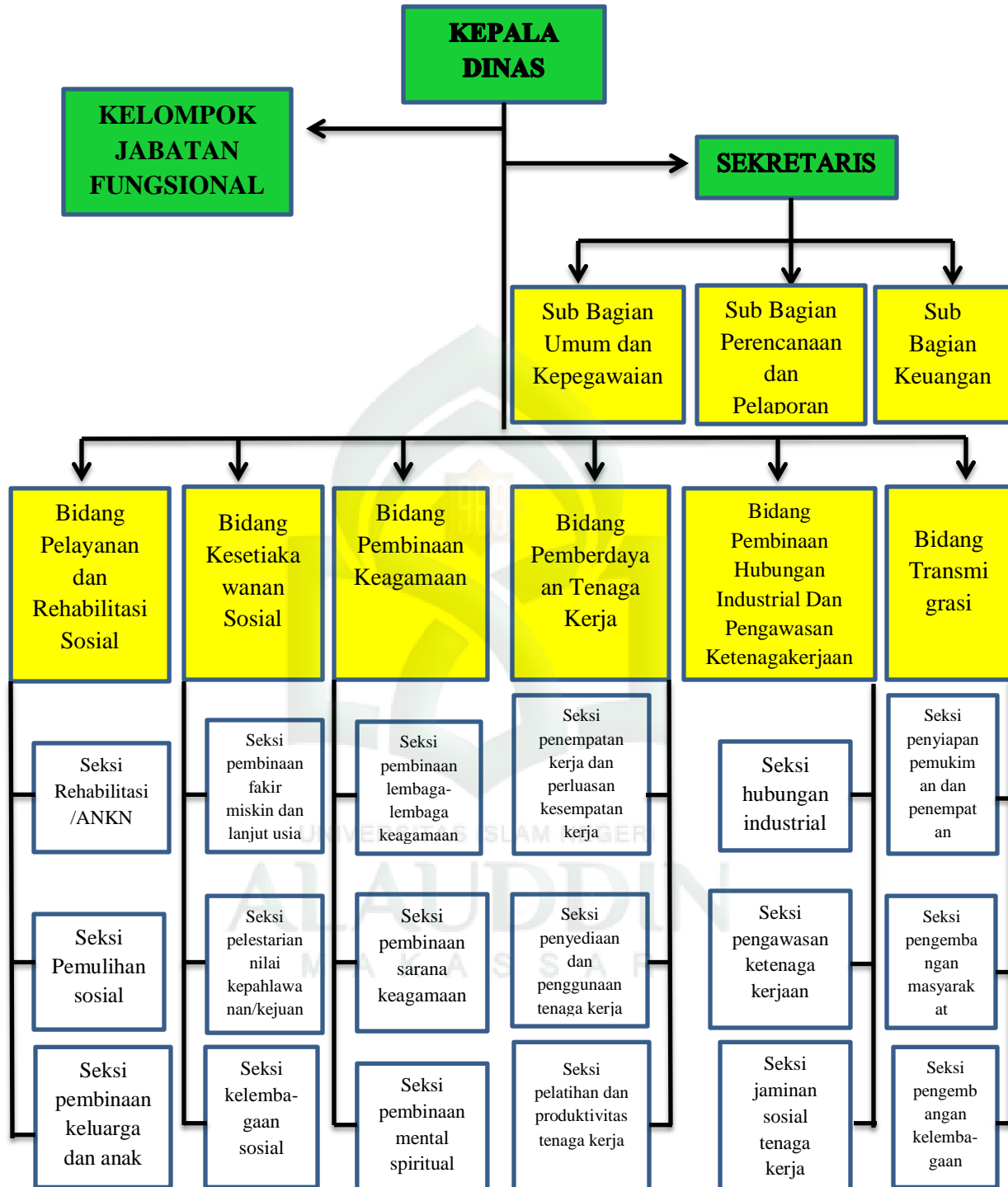
2. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalitas sumber daya aparatur yang religius melalui pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi dan informasi.
3. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
5. Meningkatkan koordinasi antar sektoral khususnya lingkup kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
6. Mengembangkan koordinasi yang kondusif kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Struktur Organisasi :

- a. Kepala Dinas Sebagai Pemimpin Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
- b. Sekertaris Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Dinas membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial/Ankn
 - 2) Seksi Pemulihan Sosial
 - 3) Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak

- d. Bidang Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Lanjut Usia
 - 2) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan
 - 3) Seksi Kelembagaan Sosial
- e. Bidang Pembinaan Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Lembaga-Lembaga Keagamaan
 - 2) Seksi Pembinaan Sarana Keagamaan
 - 3) Seksi Pembinaan Mental Spiritual
- f. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 2) Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja
 - 3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
- g. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Hubungan Industrial
 - 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- h. Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - 1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan
 - 2) Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
 - 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan

Skema struktur organisasi:



2. Informan Penelitian:

a. Dinas Sosial

- 1) Nama : Asrianty, S.STP, M.Si
 Nip : 19800525 199810 2 001
 Umur : 37 Tahun
 Jabatan : Kepala Seksi Keluarga dan Anak Bidang Pelayanan
 dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa

- 2) Nama : Sarfiah
 Nip : 19660502 199102 2 004
 Umur : 51 Tahun
 Jabatan : Staf Seksi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial Dinas
 Sosial Kabupaten Gowa

b. Wali Anak Terlantar

1. Nama : Amir (orang tua anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya).
 Umur : 49 Tahun
 Pekerjaan : Pengangkut Sampah
 Nama : Mawati (Istri Amir)
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Anak : 7 orang anak (3 meninggal, 4 masih hidup) atas nama:
 1. Amirullah : meninggal
 2. Resky : meninggal
 3. Nirma : meninggal

4. Nita: 19 tahun (putus sekolah)
5. Nisa: 17 tahun (putus sekolah)
6. Ibrahim : 7 tahun (tidak sekolah)
7. Andika : 3 tahun

Alamat : Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

2. Nama : Wardoyo Ahmad

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Pengangkut Sampah

Anak : 3 orang anak, atas nama:

1. Rafki: 6 tahun (tidak bersekolah)
2. Ikki : Meninggal
3. Rahmatullah Ibrahim : 7 bulan

Alamat : Palompong Pa'bentengang Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa

c. Anak Terlantar:

Nama : Ibrahim

Umur : 7 tahun

Alamat : Samata Kabupaten Gowa

d. Triangulasi Sumber:

Nama : Muh. Rizal

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Kepala Forum LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan)

B. Penyebab Munculnya Anak Terlantar

Anak yang menjadi terlantar tidak disebabkan oleh keinginannya sendiri. melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan data yang terdapat dilapangan antara lain:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang paling utama yang menyebabkan anak menjadi terlantar. Terlebih lagi bagi keluarga yang sehari-hari hidup serba pas-pasan, baru saja terkena PHK, dibelit utang yang terus menerus membengkak, maka bukan saja akan mudah stress melainkan anak juga akan menjadi korban penelantaran anak. Di kalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak ketika sakit acap kali diterlantarkan.⁵⁹ Selain itu, di lingkungan komunitas masyarakat miskin acap terjadi kelangsungan pendidikan yang cenderung diterlantarkan. Hal ini sesuai dengan data yang terdapat di lapangan yaitu:

*“Anakku itu mau sekali juga sekolah, bukan cuma anakku tapi ada juga beberapa anaknya tetanggaku mau juga sekolah. Tapi maumi di apa belumpa mampu kasi sekolahki anakku, untuk beli baju sekolahnya saja pinjamka uang.”*⁶⁰

2. Berasal dari Keluarga Bermasalah atau Tidak Harmonis

Faktor penyebab munculnya anak terlantar selain kemiskinan dapat juga disebabkan dari keluarga yang bermasalah. Anak-anak yang berasal dari keluarga bermasalah atau kurang harmonis akan jauh dari kasih sayang, perlindungan dan

⁵⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, h. 233.

⁶⁰ Wardoyo Ahmad (37 Tahun), Pengangkut Sampah, *Wawancara*, Sungguminasa, 18 Januari 2017.

pengawasan keluarga secara memadai. Selain itu, kebutuhan seorang anak juga dapat kurang diperhatikan oleh keluarga terutama orang tua. Akhirnya kehidupan seorang anak dapat menjadi terlantar.

Kurangnya perhatian dari keluarga juga dapat membuat kehidupan seorang anak jadi berantakan dan psikologis seorang anak dapat menjadi keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, dapat membuat kepercayaan diri seorang anak berkurang dan rasa takut dalam dirinya semakin besar. Contohnya seorang anak dapat menutup dirinya sendiri dan tidak mempunyai teman. Hal ini seperti data yang terdapat di lapangan yaitu:

*“Tidak mauja pergi sekolah biar banyak temangku. Hmm.... Malla-mallaka.”*⁶¹

Kurang tahu dan kurang perhatiannya orang tua terhadap kehidupan anaknya dapat membuat orang tua sulit untuk memberikan pengertian kepada anaknya meskipun untuk kebaikan anak itu sendiri. Seperti halnya data dari lapangan berikut:

*“Saya sebagai bapaknya, mamanya juga mendukung sekali kalau mauki sekolah ini anak. Itupun berapa kali meki bujukki tapi tetap tongji tidak mau pergi sekolah. Mauji sekolah kalau ikutka atau mamanya, baru ada juga dikerja kalau diikuti terus tidak bisaki kerja jadi yang mau dimakan lagi susahki.”*⁶²

⁶¹Baim (7 Tahun), Anak Terlantar, Wawancara, Samata, 17 Januari 2017.

⁶²Amir (49 Tahun), Pengangkut Sampah (Orang Tua Baim), Wawancara, Sungguminasa, 17 Januari 2017.

C. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam Menangani Anak Terlantar

Upaya merupakan usaha untuk mencapai maksud tertentu.⁶³ Maksud tertentu disini berkaitan dengan usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak. Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶⁴

Kesejahteraan anak dilakukan untuk meminimalisir dan memelihara adanya anak terlantar yang disebabkan oleh penelantaran anak. Kesejahteraan anak terlantar dapat dilakukan dengan cara mengurus urusan anak terlantar dan memeliharanya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Terjemahannya:

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan

⁶³Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2010), h. 596.

⁶⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 153.

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (2:220)”⁶⁵

Kesejahteraan anak terlantar dikatakan telah berhasil apabila anak-anak terlantar telah mendapatkan hak-hak dasarnya. Ada 10 kriteria hak dasar anak, yaitu:

1. Hak untuk bermain,
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan,
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan,
4. Hak untuk mendapatkan pengakuan,
5. Hak untuk mendapatkan status,
6. Hak untuk mendapatkan makanan,
7. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
8. Hak untuk berkreasi,
9. Hak kesamaan, dan
10. Hak untuk mendapatkan peran dan pembangunan.⁶⁶

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota, seperti halnya Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

⁶⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), h. 285.

⁶⁶Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam membantu Kementerian Sosial telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir, memelihara, serta melindungi anak terlantar.

Upaya-upaya Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam menangani anak terlantar di antaranya yaitu:⁶⁷

1. Melakukan Pendataan

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan.⁶⁸ Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.⁶⁹

Pendataan Dinas Sosial Kabupaten Gowa dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja sosial adalah seorang agen atau pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial dan telah menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial.⁷⁰ Pekerja sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Salah satu tenaga kesejahteraan sosial yang dimaksud yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial

⁶⁷Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

⁶⁸Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, h. 41.

⁶⁹Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1 angka (23).

⁷⁰Direktorat Pelayan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), h. 4.

Kecamatan). TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) merupakan masyarakat non PNS.⁷¹

Pendataan tidak serta merta hanya dilakukan oleh Pekerja Sosial tetapi dapat juga dilakukan oleh Forum/Komunitas Peduli Anak, Kelurahan, dan Kecamatan. Selain itu, masyarakat serta orang tua anak terlantar juga dapat melaporkan sendiri ke Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Karena masyarakat merupakan warga negara yang wajib membantu pemerintahan dalam mensejahterahkan negara Indonesia. Seperti hasil dari wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

P : Apakah hanya Dinas Sosial yang melakukan pendataan untuk anak terlantar atau bagaimana Bu?

I : Tidak. Pendataan tidak serta merta hanya dilakukan oleh Dinas Sosial tetapi dapat juga dilakukan oleh Forum/Komunitas Peduli Anak, kelurahan, kecamatan dan masyarakat serta orang tua anak terlantar juga dapat langsung melaporkan sendiri ke Dinas Sosial Kabupaten Gowa.⁷²

Pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Gowa antara lain menghimpun informasi atau data anak terlantar dengan cara turun lapangan, identifikasi informasi masalah keterlantaran anak, seleksi dan registrasi calon anak binaan atau terlantar, serta memverifikasi data anak terlantar.⁷³

⁷¹Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, *Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial* (Makassar: Seksi Penyuluhan dan Penelitian KESOS, 2011), h. 53.

⁷²Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

⁷³Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

2. Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Pelayanan Sosial adalah proses kegiatan yang teratur untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meniadakan atau meringankan masalah sosial/rintangan yang dialaminya, sehingga ia mampu menolong dirinya sendiri dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁴

Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam upayanya menangani anak terlantar telah mempunyai program pelayanan sosial yang jelas. Program pelayanan sosial anak terlantar ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni pelayanan kelembagaan dan pelayanan masyarakat.

Pelayanan Kelembagaan dilakukan oleh berbagai kelembagaan berdasarkan visi dan misi mereka. Kelembagaan yang dimaksud adalah Organisasi Sosial/LSM/yayasan, perusahaan-perusahaan (sebagai wujud tanggung jawab sosial dunia usaha), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Sedangkan, pelayanan masyarakat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang telah tumbuh di masyarakat dan dapat juga dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Program pelayanan sosial anak terlantar baik dalam bentuk pelayanan kelembagaan maupun masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam wujud menitipkan anak-anak terlantar ke dalam LKSA.

⁷⁴Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 4.

LKSA merupakan lembaga pemerhati anak termasuk anak terlantar yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. LKSA mengambil data anak terlantar dari Dinas Sosial kemudian LKSA memberikan pelayanan untuk anak terlantar. Pelayanan yang dilakukan oleh LKSA yakni pelayanan sosial anak terlantar dalam panti asuhan (pelayanan kelembagaan) maupun di luar panti (pelayanan masyarakat). Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu:

P : LKSA sebenarnya lembaga yang bergelut dibidang apa pak?

I : LKSA itu singkatan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga ini merupakan lembaga pemerhati anak, salah satunya anak terlantar. Lembaga ini bekerja sama dengan Dinas Sosial.

P : Apa saja yang dilakukan oleh LKSA untuk anak terlantar?

I : LKSA mengambil data anak terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa kemudian melakukan pelayanan terhadap anak terlantar.

P : Pelayanan apa saja yang dilakukan oleh LKSA terhadap anak terlantar?

I : Pelayanan dari LKSA untuk anak terlantar itu seperti pelayanan dalam panti (lembaga) dan pelayanan luar panti (masyarakat).⁷⁵

Dimana pelayanan sosial anak terlantar dalam panti merupakan pelayanan kelembagaan dan pelayanan luar panti merupakan pelayanan dari masyarakat.

a. Pelayanan Sosial Anak Terlantar Dalam Panti Asuhan

Pelayanan sosial panti adalah suatu pola pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dalam suatu lembaga/kesatuan kerja, dimana dalam

⁷⁵Muh. Rizal (45 Tahun), Ketua Forum LKSA Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, Sungguminasa, 16 januari 2017.

penyelenggaraannya mengikut sertakan masyarakat sekitarnya, dimana klien dapat melakukan aktivitas/kerja di luar.⁷⁶

Panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Dalam panti asuhan, seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diselenggarakan. Bahkan anak-anak dapat mengakses pendidikan yang sebelumnya sangat susah untuk mereka rasakan. Selain itu, dalam panti asuhan mereka juga diajarkan tentang agama sehingga perilaku dan kebiasaan mereka bisa menjadi lebih baik dengan adanya bekal ilmu agama yang diberikan. Adanya pelayanan-pelayanan dalam panti asuhan dapat sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup anak terlantar.

Pelayanan sosial anak terlantar dalam panti memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan Umum

Terpenuhinya hak dan kebutuhan anak terlantar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

2) Tujuan Khusus

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keterampilan, perlindungan, persamaan perlakuan, dan mental spiritual.
- b) Terpenuhinya rasa aman dan peluang berpartisipasi dalam proses pelayanan sosial dan kehidupan masyarakat.

⁷⁶Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 5.

- c) Terciptanya kondisi sosial dan kemampuan anak untuk menghindari tingkah laku sosial yang menyimpang.
- d) Terjangkaunya lebih banyak anak terlantar yang memperoleh pelayanan sosial.⁷⁷

Pelayanan LKSA dalam panti asuhan contohnya yaitu diberikannya pakaian, tempat tinggal, pendidikan atau pengajaran keagamaan, kesempatan bermain dan berteman, bisa sekolah dan belajar kembali, serta ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat anak terlantar.⁷⁸

Untuk memperjelas pelayanan LKSA, maka secara garis besar ada empat program besar dalam penanganan anak terlantar yaitu pencegahan, perlindungan, pelayanan, dan penjangkauan. Berdasarkan besaran program tersebut, rincian kegiatan pelayanan sosial anak terlantar meliputi:⁷⁹

i. Pelayanan fisik dan kesehatan

Pelayanan fisik dan kesehatan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan anak, sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya. Kegiatan ini bisa diwujudkan dengan penyediaan makan yang memenuhi standard gizi, penyediaan pakaian, kegiatan olah raga, penyediaan obat-obatan, dan rujukan ke Puskesmas/rumah sakit. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas panti yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya.

⁷⁷Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, h. 18-19.

⁷⁸Muh. Rizal (45 Tahun), Ketua Forum LKSA Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Sunguminasa, 16 januari 2017.

⁷⁹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, h. 23-25.

ii. Pelayanan mental spiritual dan psikososial

Pelayanan mental spiritual dan psikososial yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya dan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat sebagai perwujudan orang beragama. Contohnya mengajari anak-anak mengaji, berdoa dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas panti atau luar panti yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya.

iii. Pelayanan sosial

Pelayanan Sosial yakni proses pelayanan yang ditujukan kepada anak agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh pelayanan sosial ini yaitu memberikan peluang bagi anak-anak untuk bermain.⁸⁰ Bermain sangat penting bagi mental, emosional dan kesejahteraan anak.⁸¹ Oleh karena itu, bermain tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak.⁸² Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial.

iv. Pelayanan pendidikan

Pelayanan pendidikan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk anak yang masih sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan sekolah. Selain itu panti juga perlu menyediakan sarana dan prasarana belajar sesuai dengan kebutuhan anak, dalam rangka pelaksanaan bimbingan kelompok belajar sesuai dengan tingkat pendidikan anak.

⁸⁰Sarfiah (51 Tahun), Staf Seksi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 20 Januari 2017.

⁸¹Dony Setiawan Hendyca Putra, dkk, *Keperawatan Anak dan Tumbuh Kembang* (Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 92.

⁸²Nursalam, dkk, *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak* (Cet. II; Jakarta: Salemba Medika, 2008), h. 84.

Pendidikan sangat penting bagi anak, maka dengan adanya panti asuhan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan kembali dengan cara bersekolah. Bagaimanapun pendidikan yang baik tetap di dapatkan dari sekolah.⁸³ Karena sekolah bukanlah sekedar suatu kumpulan yang terdiri dari para pelaksana administrasi, guru dan murid dengan segala sifat dan pembawaan mereka masing-masing. Lebih dari itu, sekolah merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan yang mapan, yang menentukan apa yang terjadi di sekolah.⁸⁴

v. Bimbingan pelatihan keterampilan

Bimbingan pelatihan keterampilan merupakan proses pelayanan yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang usaha ekonomis produktif. Bimbingan pelatihan keterampilan disamping merupakan kegiatan pengisian waktu luang bagi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan anak juga dalam usaha memperoleh keterampilan praktis sebagai persiapan anak memasuki dunia kerja atau usaha sendiri bila sudah keluar dari panti. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas panti atau luar panti sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis pelatihan keterampilan disesuaikan dengan bakat dan minat anak.

⁸³Sarfiah (51 Tahun), Staf Seksi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 20 Januari 2017.

⁸⁴Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam* (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 343.

Contoh pelatihan keterampilan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain: pelatihan perbengkelan yang diikuti 20 anak, pelatihan menjahit diikuti 30 anak, dan pelatihan tata boga diikuti 15 anak.⁸⁵

Proses pelayanan sosial anak terlantar dalam panti perlu dilengkapi dengan tersedianya berbagai form dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang mencakup:

- Penerimaan,
- Identifikasi masalah,
- Pengungkapan dan pemahaman masalah,
- Persiapan pelayanan (kontak dan kontrak),
- Perumusan masalah,
- Penyusunan rencana pelayanan,
- Pelaksanaan pelayanan,
- Evaluasi,
- Terminasi,
- Pelayanan lanjut.⁸⁶

b. Pelayanan Sosial Anak Terlantar Luar Panti Asuhan

Pelayanan sosial luar panti/non panti adalah situasi sistem pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam lingkungan keluarga dan rehabilitasi masyarakat melalui

⁸⁵Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

⁸⁶Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, h. 27-28.

Loka Bina Karya (LBK), Balai Pelatihan Kerja (BPK) dan tempat lain yang ditunjuk sebagai wadah pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial.⁸⁷

Pelayanan anak terlantar luar panti asuhan oleh LKSA dapat berupa adanya sosialisasi atau penyuluhan dari masyarakat atau kelompok/komunitas peduli anak agar dapat lebih memperhatikan anak terlantar disekitarnya, adanya kelompok belajar untuk anak terlantar, adanya sumbangan dari masyarakat sekitar, dan lain-lain.⁸⁸

Pelayanan sosial anak terlantar luar panti juga memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan Umum

Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar baik jasmani, rohani, mental, dan sosial, seta terciptanya keluarga dan komunitas yang berkualitas baik ekonomi maupun sosial.

2) Tujuan Khusus

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, sosialisasi, mental spiritual dan sebagainya.
- b) Terwujudnya partisipasi aktif keluarga dan masyarakat lokal, serta dunia usaha dalam pelayanan sosial anak terlantar.⁸⁹

⁸⁷Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 5.

⁸⁸Muh. Rizal (45 Tahun), Ketua Forum LKSA Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 januari 2017.

⁸⁹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, h. 31.

Secara garis besar ada empat program besaran dalam penanganan anak terlantar luar panti, yakni:⁹⁰

- 1) *Program penjangkauan*, yaitu upaya yang dilakukan pekerja sosial atau petugas pelayanan untuk menjangkau anak terlantar dan keluarganya. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kontak pendahuluan dengan calon sasaran.
- 2) *Program pemenuhan kebutuhan sosial dasar anak*, antara lain meliputi makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, rekreasi, dan sebagainya.
- 3) *Program pencegahan dan proteksi*, yang antara lain meliputi peningkatan ekonomi keluarga, pencegahan terjadinya tindak kekerasan dan perlakuan salah pada anak, perlindungan dalam pasarkerja dan sebagainya.
- 4) *Program peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat lokal* dalam pelayanan anak terlantar di lingkungannya, yang antara lain meliputi upaya peningkatan partisipasi keluarga mampu, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial anak terlantar.

Pelayanan sosial anak terlantar di luar panti mempunyai beberapa langkah dalam tekhnis operasional pelayanan sosial, yaitu:⁹¹

- 1) Pendekatan awal

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal sebelum anak menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

⁹⁰Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, h. 33.

⁹¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti*, h. 41-48.

Pada tahap ini pekerja sosial atau pelaksana program pelayanan mengadakan kontak awal dengan anak terlantar dan keluarganya yang akan menerima bantuan pelayanan. Pada program keluarga asuh dan orang tua asuh, diadakan kontak awal dengan calon keluarga asuh maupun calon orang tua asuh yang akan mendukung pelayanan sosial anak terlantar di luar panti.

2) Pengkajian

Kegiatan membahas, mengkaji permasalahan anak terlantar untuk menentukan jenis pelayanan yang tepat. Pada tahap ini pekerja sosial atau pelaksana program mengadakan kajian terhadap berbagai data dan informasi yang diperoleh pada saat pendekatan awal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam asesmen mencakup:

- Melaksanakan kajian terhadap kondisi anak dan keluarganya, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhannya dan harapannya.
- Melaksanakan kajian terhadap berbagai sumber yang tersedia dan dapat dijangkau serta dimanfaatkan dalam pelayanan sosial anak.
- Mengadakan evaluasi terhadap hasil kajian masalah dan sumber, untuk menentukan skala prioritas kebutuhan dan masalah yang perlu diselesaikan melalui langkah-langkah kegiatan yang tepat.

3) Rencana intervensi

Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan bentuk-bentuk penanganan yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dilakukan dalam suatu pembahasan kasus dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan sosial kepada anak binaan.

4) Pelaksanaan intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan implementasi dari rencana intervensi yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan intervensi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan sosial kepada anak terlantar luar panti.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jenis pelayanan dapat dilihat pada uraian berikut:

- Pelayanan kepada anak dan keluarganya, terutama anak terlantar yang tinggal bersama orang tua. Pelayanan ini meliputi:
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada orang tua agar siap untuk mengikuti program pelayanan.
 - Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan anak, seperti peningkatan gizi, bantuan pendidikan dan atau kesempatan belajar, pelayanan kesehatan, dan pelayanan keterampilan.
 - Peningkatan ekonomi keluarga, antara lain berupa bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk menunjang peningkatan kemampuan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak terlantar.
 - Pelatihan pengelolaan usaha, penciptaan kelompok usaha, pengembangan pemasaran dan sebagainya.
 - Monitoring dan bimbingan kepada anak terlantar dan orang tua oleh pekerja sosial secara rutin/periodik. Agar pelayanan sosial dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- Pelayanan anak terlantar melalui keluarga asuh atau keluarga pengganti. Pelayanan ini berupa pemeliharaan anak terlantar oleh keluarga asuh, yakni

upaya memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

- Pelayanan anak terlantar melalui orang tua asuh merupakan program bantuan biaya belajar oleh para keluarga mampu yang peduli terhadap permasalahan anak terlantar. Pelayanan ini sejalan dengan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).
- Pelayanan bimbingan keterampilan, yaitu memberikan bekal keterampilan terutama bagi anak-anak terlantar putus sekolah yang karena suatu sebab tidak lagi dapat mengikuti atau melanjutkan sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan anak dapat memiliki keterampilan praktis sebagai bekal dasar untuk memasuki pasar kerja.
- Pelayanan pengembangan masyarakat, yakni pelayanan yang diberikan dalam kaitannya dengan pengembangan komunitas yang diidentifikasi banyak anak terlantar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelayanan ini mencakup:
 - Penyadaran masyarakat dengan sasaran keluarga dan warga masyarakat. Fokusnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam mencegah dan menanggulangi masalah anak terlantar dilingkungannya.
 - Pendampingan oleh pekerja sosial secara berkala agar komunitas dapat memahami permasalahan, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan sampai dengan evaluasi. Dalam hal ini prinsipnya adalah partisipatif dan pemberdayaan dari oleh dan untuk masyarakat.

5) Evaluasi dan Monitoring

Setiap pelayanan yang diberikan perlu diadakan evaluasi dan monitoring agar dapat diketahui hasil yang telah dicapai, dan untuk selanjutnya dapat disusun rencana tindak lanjut. Berbagai kegiatannya antara lain: menyusun rencana evaluasi dan monitoring; evaluasi bersama penerima pelayanan, lingkungan komunitas, dan pihak-pihak terkait mengenai hasil yang telah dicapai; merumuskan hasil evaluasi dan monitoring serta membahasnya dengan semua unsur yang terlibat dalam upaya pelayanan, guna merumuskan rencana pelayanan lanjut; dan pengakhiran intervensi dan pemutusan hubungan dengan penerima layanan.

3. Pendampingan Sosial Anak Terlantar

Pendampingan sosial diartikan sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara dengan Lembaga Pelaksana/Pengelola, masyarakat sekitar, dan peserta/sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan aksebilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.⁹²

Pendampingan sosial dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut.⁹³ Dalam hal ini, pendampingan pada prinsipnya untuk pemberdayaan anak terlantar dan lembaga yang terkait.

⁹²Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006), h. 62.

⁹³Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

Tujuan dari pendampingan sosial adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pelaksana dalam pemahaman terhadap pilihan-pilihan dan prosedur-prosedur serta tindakan-tindakan dalam upaya pemecahan masalah.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah dalam pemberian pelayanan kepada peserta dan sasaran pelayanan.
- c. Meningkatkan akses Lembaga Pelaksana terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan usaha dan kerjasama lainnya.⁹⁴

Contoh pendampingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak terlantar antara lain: mendampingi anak pada saat menerima pelatihan perbengkelan, menjahit dan tata boga. Contoh ini didapatkan dari hasil wawancara berikut ini:

P : Bisa Ibu sebutkan contoh pendampingan sosial yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak terlantar?

I : Contohnya yaitu mendampingi anak-anak terlantar pada saat ada pelatihan pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial seperti pada saat pelatihan perbengkelan, pelatihan menjahit, pelatihan tata boga atau masak memasak, dan lain-lain.⁹⁵

⁹⁴Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial*, h. 63.

⁹⁵Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar sesuai dengan UUD RI tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 6 Tahun 1974, UU No. 2 Tahun 1988, Perda Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun dan Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁶

D. Hasil Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Hasil dari penanganan anak terlantar yang telah dilakukan oleh Dinas sosial Kabupaten Gowa yang ingin diketahui yaitu efektif atau belum efektifnya pasal 34 UUD RI tahun 1945 tentang pemeliharaan anak terlantar.

Adapun pengertian efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya ketertarikan antara nilai-nilai yang bervariasi.⁹⁷ Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat tercapai.⁹⁸ Efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

⁹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa*, pasal 9.

⁹⁷Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, h. 129.

⁹⁸Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 59.

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁹⁹ Selain itu, efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁰⁰

Jika didasarkan pada pasal 34 UUD RI Tahun 1945, hasil penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial masih belum efektif. Sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Sosial tentang anak terlantar pada seluruh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Kabupaten Gowa pada tahun 2015 yang tercatat sebesar 3.284 anak. Kemudian setelah pendataan ulang pada tahun 2016 jumlah anak terlantar yang tercatat pada seluruh LKSA Kabupaten Gowa hanya ada 1.018 anak bukan lagi 3.284 anak. Dimana selebihnya sebanyak 2.266 anak kembali terlantar. Hal ini dikarenakan ada beberapa panti asuhan yang sudah tutup dan tidak beroperasi lagi. Data 2.266 anak yang belum terlayani dan terpelihara ini didapatkan dari beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Somba Opu tercatat 1.047 anak, Kecamatan Pallangga 839 anak, Kecamatan Tompo Bulu 170 anak, Kecamatan Bontomarannu 66 anak, Kecamatan Bontonompo Selatan 55 anak, Kecamatan Pattallassang 30 anak, Kecamatan Bajeng 27 anak, Kecamatan Bontonompo 25 anak dan Kecamatan Biring Bulu 15 anak.¹⁰¹

Berdasarkan data tersebut, meskipun pada tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah melakukan pelayanan kepada 3.284 anak dengan memasukkannya ke

⁹⁹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 62.

¹⁰⁰Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Cet. VII; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), h. 53.

¹⁰¹Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Data LKSA Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2016* (12 Januari 2016).

dalam LKSA, namun tetap saja masih dikatakan belum efektif dikarenakan pada tahun 2016 sebanyak 2.266 anak kembali terlantar. Alasannya, karena yang dimaksud dengan efektif adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁰² Sedangkan dari data penelitian, Dinas Sosial Kabupaten Gowa belum berhasil dengan baik dalam proses penanganannya terhadap anak terlantar.

Belum efektifnya penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial dikarenakan beberapa kendala, antara lain:

1. Kurangnya APBN dan APBD

Dalam memelihara atau menangani anak terlantar secara menyeluruh masih sulit. Hal ini dikarenakan jumlah anak yang semakin banyak dan melebihi bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Biaya Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah). Meskipun sudah ada bantuan dana langsung dari Kementerian Sosial, tetapi tetap saja jumlah anak yang ada masih melebihi dari jangkauan bantuan dana itu sendiri. Sehingga dalam penanganan anak terlantar ini, anak terlantar hanya bisa diminimalisir tapi belum bisa dituntaskan secara menyeluruh.

P : Menurut Ibu, apakah ada kendala yang dialami dalam upaya penanganan anak terlantar ini?

I : Iya ada. Salah satunya dari anggaran APBN dan APBD yang terbatas, sedangkan jumlah anak melebihi jumlah anggaran (banyak).¹⁰³

¹⁰²Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 109.

¹⁰³Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

Contohnya yaitu data dari Dinas Sosial pada tahun 2016 menyebutkan 150 anak terlantar telah mendapatkan bantuan langsung dari Kementerian Sosial selain dari APBN dan APBD. Sedangkan jumlah anak terlantar lebih dari 150 anak.

P : Jadi dari kurangnya anggaran ini, berarti tidak semua anak terlantar bisa mendapat bantuan Bu?

I : Jika berharap dari APBN dan APBD memang belum mencukupi, tapi kita juga sudah mendapat bantuan dana dari Kementerian Sosial dan sudah ada 150 anak yang mendapatkan bantuan langsung tersebut pada desember 2016 kemarin. Yaa.. meskipun belum semuanya dapat, tapi setidaknya sudah lebih bisa terbantu.¹⁰⁴

2. Kurangnya Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam Dinas Sosial Kabupaten Gowa hanya ada 6 orang yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.

P : Bu, kalau boleh tau berapa jumlah pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gowa ini Bu?

I : Pekerja sosial itu sebenarnya disebut dengan Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial). Jumlahnya ada 6 orang, 4 perempuan dan 2 orang laki-laki. Namanya itu Kartika Ayu S.Sos, Niswati S.Sos, Erni S.Sos, Soraya S.Sos, Iksan S.Sos, dan Reza S.Sos.¹⁰⁵

¹⁰⁴Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

¹⁰⁵Sarfiah (51 Tahun), Staf Seksi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 20 Januari 2017.

Pekerja sosial inilah yang membantu Dinas Sosial dalam mencari atau melakukan pendataan anak terlantar di Kabupaten Gowa.¹⁰⁶ Kabupaten Gowa mempunyai 18 Kecamatan dan setiap kecamatan ada beberapa Kelurahan, Desa maupun Dusun. Sedangkan pekerja sosialnya hanya ada 6 orang. Hal inilah yang membuat pendataan yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan keterbatasan jumlah pekerja sosial yang ada. Sehingga beberapa lokasi masih belum sempat dijangkau oleh pekerja sosial dalam melakukan pendataan anak terlantar. Seperti hasil wawancara dari salah satu warga yaitu:

P : Apakah ada pendataan yang pernah dilakukan di daerahta pak?

I : Sampai sekarang belum pernahpi ada pendataan yang dilakukan di sini di Palompompong (Pa'bentengan Kecamatan Bajeng) mau dari Dinas Sosial, Pak Lurah, atau masyarakat. Baru saya juga mau sekali didata supaya anakku juga bisaki sekolah kayak teman-temannya yang lain. Anakku usianya 6 tahun, namanya Rafki. Anakku itu mau sekali juga sekolah, bukan cuma anakku tapi ada juga beberapa anaknya tetanggaku mau juga sekolah. Tapi maumi di apa belumpa mampu kasi sekolahki anakku, untuk beli baju sekolahnya saja pinjamka uang. Coba ada pendataan biar dikasih masuk di panti asuhan biar mi siapja, anakku juga mauji yang penting sekolahki. Supaya nanti bisaki jadi pilot atau jadi orang sukses kalo sekolahki tidak kayak saya jadi pemungut sampah.”¹⁰⁷

¹⁰⁶Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Wawancara, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

¹⁰⁷Wardoyo Ahmad (37 Tahun), Pengangkut Sampah, Wawancara, Sungguminasa, 18 Januari 2017.

3. *Kurangnya pendekatan awal terhadap anak*

Kurangnya pendekatan awal terhadap anak terlantar sebelum melakukan pelayanan sosial dapat membuat anak tidak mempunyai respon yang baik dan membuat anak merasa takut. Respon yang kurang baik dan rasa takut yang muncul dalam diri seorang anak terkadang dikarenakan anak kaget, tidak mengenal lingkungannya atau tidak pernah bermain dengan anak sebayanya. Selain itu dapat pula disebabkan oleh benda atau orang asing, kegelapan, petir, binatang buas, berkunjung kedokter, dan berpisah dengan orang tua.¹⁰⁸ Seperti halnya yang dirasakan oleh Baim pada saat wawancara berikut ini:

P : Dek kenapa tidak mauki sekolah? Padahal kalau sekolahki bisaki belajar, punyaki banyak teman.

I : Hmm... kalau sekolah orang bisa langsung jadi polisi?

P : Kalau sekolahki bisaki belajar, bisaki jadi orang pintar, nanti juga bisaki jadi polisi kalau pintarki kalau polisi haruspi tau membaca dengan menulis. jadi sekolahki dulu dek.

I : Hmmm... tidak mauja deh, di rumahma saja sama mama dengan bapakku. Kalau pergika sekolah haruspi ikut mamakku sama bapakku. Kalo tidak ikuki tidak mauja juga sekolah. Tidak mauja pergi sekolah biar banyak temangku. Hmm.... Malla-mallaka.¹⁰⁹

Rasa takut yang dialami anak dapat dihilangkan dengan adanya pendekatan awal dengan memberikan pengertian terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Hal ini dapat berguna untuk mengetahui dan mengenal keadaan anak terlebih dahulu.

¹⁰⁸Ade Benih Nirwana, *Psikologi Ibu, Bayi dan Anak* (Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), h. 171.

¹⁰⁹Baim (7 Tahun), *Anak Terlantar, Wawancara*, Samata, 17 Januari 2017.

Pendekatan awal juga dapat memperbaiki psikologi dan pola pikir anak agar anak dapat berkembang dan tidak merasa terancam atau takut lagi. Namun data yang didapat di lapangan, pendekatan awal belum secara efektif dilakukan. Meskipun masyarakat sudah ada yang membantu dan dari pihak pelayanan sosial juga sudah mendata. Tetapi tetap saja dibutuhkan pendekatan untuk membuat anak merasa nyaman dan aman. Seperti salah satu data yang didapat peneliti di lapangan pada saat wawancara di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa, yaitu:

P : Pak/Bu apa sudah pernah ada pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial atau masyarakat untuk menyekolahkan anak bapak dengan ibu?

I : Kalau dari Dinas Sosial mendata-mendata begitu sudah pernah ada, masyarakat ada juga kayak pak ustadz yang kasih kerjaan ini. Itu pak ustadz mau nakasih sekolah SD anakku. Tapi anakku tidak mau pisah tidak mau sekolah.

P : Waktu pendataanki pak, tidak ada yang nalakukan pihak dinas sosial selain mendata? Kayak pergi nadekati anakta, nakasih pengertian atau nabujukki supaya mau sekolah. Ada atau tidak pak?

I : Tidak ada, padahal kalo ada yang bisa bujukki anakku untuk sekolah bersyukur sekali sebagai orang tua. Karena saya sebagai bapaknya, mamanya juga mendukung sekali kalau mau sekolah ini anak. Itupun berapa kali meki bujukki tapi tetap tongji tidak mau pergi sekolah. Mauji sekolah kalau ikutka atau mamanya, baru ada juga dikerja kalau diikuti terus tidak bisaki kerja jadi yang mau dimakan lagi susahki. Mamanya juga

*najagaki adeknya yang masih kecil.*¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara ini, pendekatan awal pada saat pendataan sangat diperlukan. Karena meskipun sudah ada pelayanan yang akan dilakukan tapi dengan kurangnya pendekatan awal terhadap anak dapat membuat beberapa anak tetap nyaman dengan dunianya sehingga pelayanan sosial susah untuk dilakukan.



¹¹⁰ Amir (49 Tahun), Pengangkut Sampah (Orang Tua Baim), *Wawancara*, Sungguminasa, 17 Januari 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Munculnya anak terlantar dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis.
2. Dinas Sosial Kabupaten Gowa telah melakukan upaya-upaya untuk menangani anak terlantar, antara lain 1). *melakukan pendataan anak terlantar*, 2). *memberikan pelayanan sosial anak terlantar serta menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)* dan 3). *melakukan pendampingan sosial anak terlantar*.
3. Penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ternyata masih belum efektif. Artinya pelaksanaan dari UU belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena anak terlantar di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 masih ada yang belum terlayani dan terpelihara oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan kurangnya APBN dan APBD, kurangnya pekerja sosial, dan kurangnya pendekatan awal pada saat melakukan pendataan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti guna membantu Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam penanganan anak terlantar yaitu:

1. Untuk Pemerintah, perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus mengarah kepada kepentingan dan permasalahan anak terlantar.
2. Untuk Kementerian Sosial, perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerja sosial di tiap Kabupaten/Kota. Karena dengan kurang atau terbatasnya pekerja sosial dalam membantu Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar membuat penanganannya tidak terealisasi dengan baik.
3. Untuk Dinas Sosial, perlu meningkatkan program-program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya, serta tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar.
4. Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak.
5. Untuk masyarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah sekitar dalam menangani anak terlantar dengan cara lebih memperhatikan kondisi anak-anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Jakarta: FISIP UI Press, 2005.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Cipta Karya, 2000.
- “Anak”, *Wikipedia*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. (24 Oktober 2016).
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Azhim, Said Abdul. *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*. Cet. I; Jakarta Timur: Istanbul, 2016.
- Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI. *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006.
- Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*. Makassar: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, 2013.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI. *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008.
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Panduan Praktis Pendampingan Dalam*

- Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Joni, Muhammad dan Zhulaihana Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*. Bandung: Citra Aditiya Bakti , 1999.
- Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cet. VII; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Kementrian Agama RI., *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Quran, 2011.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2006.
- Napsiyah, Siti dan Lisna Diawati Fuaid. *Belajar Teori Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Nirwana, Ade Benih. *Psikologi Ibu, Bayi dan Anak*. Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.

- Novia, Windy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2010.
- Nursalam, dkk. *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak*. Cet. II; Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*. Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam*. Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Putra, Dony Setiawan Hendyca, dkk. *Keperawatan Anak dan Tumbuh Kembang*. Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional, Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Seksi Penyuluhan dan Penelitian KESOS. *Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial*. Makassar: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sumiarni, MG. Endang dan Chandera Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suud, Muhammad. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group,

2013.

‘Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Cet. I; Jawa Tengah: Al Andalus, 2015.

Wadang, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo, 2000.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Undang-undang :

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa*.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 *tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota*.

Wawancara :

Amir (49 Tahun), Pengangkut Sampah (Orang Tua Baim), *Wawancara*, Samata, 17 Januari 2017.

Asrianty (37 Tahun), Kepala Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

Baim (7 Tahun), Anak Terlantar, *Wawancara*, Sungguminasa, 17 Januari 2017.

Muh. Rizal (45 Tahun), ketua forum LKSA Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Sungguminasa, 16 Januari 2017.

Sarfiah (51 Tahun), Staf Seksi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Sungguminasa, 20 Januari 2017.

Wardoyo Ahmad (37 Tahun), Pengangkut Sampah (Orang Tua Baim), *Wawancara*, Samata, 18 Januari 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Pattallassang Kabupaten Gowa pada 9 Juni 1995. Anak pertama dari dua bersaudara, terlahir dengan nama Andi Resky Firadika, sapaan akrab adalah Ares atau Riska. Gadis campuran Makassar bugis ini Lahir dari seorang ibu bernama Andi Besse Sarfiah dan seorang ayah bernama Paharuddin Kaneng SH, MH. Selama mengejar pendidikan ia pernah bersekolah di TK Bayangkara, SDN 2 Sungguminasa mulai tahun 2001 sampai tahun 2007. Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sungguminasa mulai tahun 2007 sampai 2010. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungguminasa mulai tahun 2010 sampai tahun 2013.

Dan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 ditempuh selama 3 tahun 11 bulan 3 hari. Selain aktif kuliah, ia juga pernah aktif dibeberapa organisasi. Organisasi pertama yang diikuti ialah IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) sejak SMP, kemudian bergabung dengan PMR Wira Salis pada saat SMA dan sempat menjabat sebagai bendahara umum. Kemudian saat kuliah, ia juga bergabung dalam sebuah organisasi di luar kampus yaitu PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR